PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERUYAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)

TAHUN 2026

DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERUYAN

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

#DINSOS SELALU ADA

Sekretariat :
Jl. M. Hatta Kuala Pembuang
https://dinsos.seruyankab.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 (P-RENJA TAHUN 2026)

DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2026

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 499 /2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR 100.3.3.2/304/2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./304/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 26);

16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./304/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

KETIGA : Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN;
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : PENUTUP.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 September 2026

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 499 /2026
TANGGAL 2 September 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN NOMOR 100.3.3.2./304/2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	*2*
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	*2*
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	*2*
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN

8. PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini dapat kami susun. Dan kepada semua pihak yang telah terlibat sumbangsihnya baik tenaga, pemikiran dukungan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Kerja Pembangunan Bidang Sosial. Perubahan Rencana Kerja ini memuat gambaran tentang evaluasi pelaksananaan Rencana Kerja (Renja) sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026.

Kami menyadari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak kekurangan dan memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya, dan kami akan terus memperbaikinya dalam rangka pengelolaan tata pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel dan partisipatif.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini dapat dijadikan panduan untuk melaksanakan kegiatan, sehingga cita-cita pembangunan bidang Sosial Kabupaten Seruyan dapat tercapai.

Kuala Pembuang, 2 September 2026
Kepala Dinas Sosial,

HALIDAH, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Gambaran Umum Organisasi..... 3

1.2 Dasar Hukum 7

1.3 Maksud dan Tujuan 10

1.5 Sistematika Penulisan 12

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN . 14

2.1 Evaluasi Terhadap Capaian Renstra Dinas Sosial..... 14

2.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)..... 15

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)..... 19

2.2. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2026 21

2.3 Evaluasi Terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2026..... 40

2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial..... 42

2.4.1. Kinerja Pelayanan Dari Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 42

2.4.2 Kinerja Pelayanan Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2026 44

2.4.3 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) 47

2.4.4 Capaian Atas Asersi Sektor Kemiskinan 47

2.5 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026..... 49

2.5.1. Permasalahan Pelayanan Sosial..... 50

2.4.2 Isu Strategis Dinas Sosial Tahun 2026..... 42

2.6 Penelaahan Terhadap Kebijakan / Perubahan RKPD ... 55

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 56

3.1 Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Sosial..... 56

3.2 Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 57

3.2.1 Program Dinas Sosial berdasarkan Urusan Wajib (Urusan Sosial)..... 59

3.2.1 Program Dinas Sosial berdasarkan Urusan Penunjang 61

3.3 Matrik Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Sosial 63

3.4 Program Dan Kegiatan Pendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) 81

3.3.1 Program dan Kegiatan Pendukung Pengentasan Kemiskinan 81

3.3.2 Program dan Kegiatan Pendukung Standar Pelayanan Minimum (SPM)..... 83

3.5 Integrasi Program Dinas Sosial Pendukung Program Prioritas Janji Politik Bupati, Janji Politik Gubernur Dan Janji Politik Presiden Tahun 2026 85

3.6 Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dan Aspirasi Masyarakat 91

BAB IV. PENUTUP 92

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Aturan tersebut mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ketentuan pasal 82 ayat (2) dan pasal 83, bahwa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan RKPD dan Hasil Forum Perangkat Daerah. Renja ini diharapkan dapat menjadi acuan kinerja perangkat daerah dan dapat dilaksanakan secara realistis serta dapat memenuhi fungsi akuntabilitas berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan Sumber Daya Manusia di masing-masing perangkat Daerah.

Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan teknis operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dalam mendorong partisipasi masyarakat

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, diantaranya menegaskan bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD tahun 2026 dan perubahan APBD TA 2026.

Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2026 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026 dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tahun 2026 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan petunjuk teknis Surat Edaran Bupati Seruyan Nomor : 900.1.12/310/SE/III/2026 Tentang Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran ada beberapa hal terkait anggaran yang harus disesuaikan, terutama untuk melaksanakan petunjuk teknis maupun operasional dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah sehingga perlu adanya Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2026. Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dapat terdiri atas:

a. tambahan atau pengurangan alokasi anggaran sebagai akibat Efisiensi APBD, pergeseran anggaran antar Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
b. realokasi anggaran belanja dari yang telah ditetapkan dalam DPA; dan/atau
c. revisi administrasi.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga ada konsistensi antara kewenangan Dinas dengan kebutuhan riil pelayanan bidang Kesejahteraan Sosial kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Seruyan.

Di sisi yang lain, Perubahan RENJA Tahun 2026 ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026, serta dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, dan diatur tata kelola organisasinya berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan wajib pelayanan dasar pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah disektor Kesejahteraan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

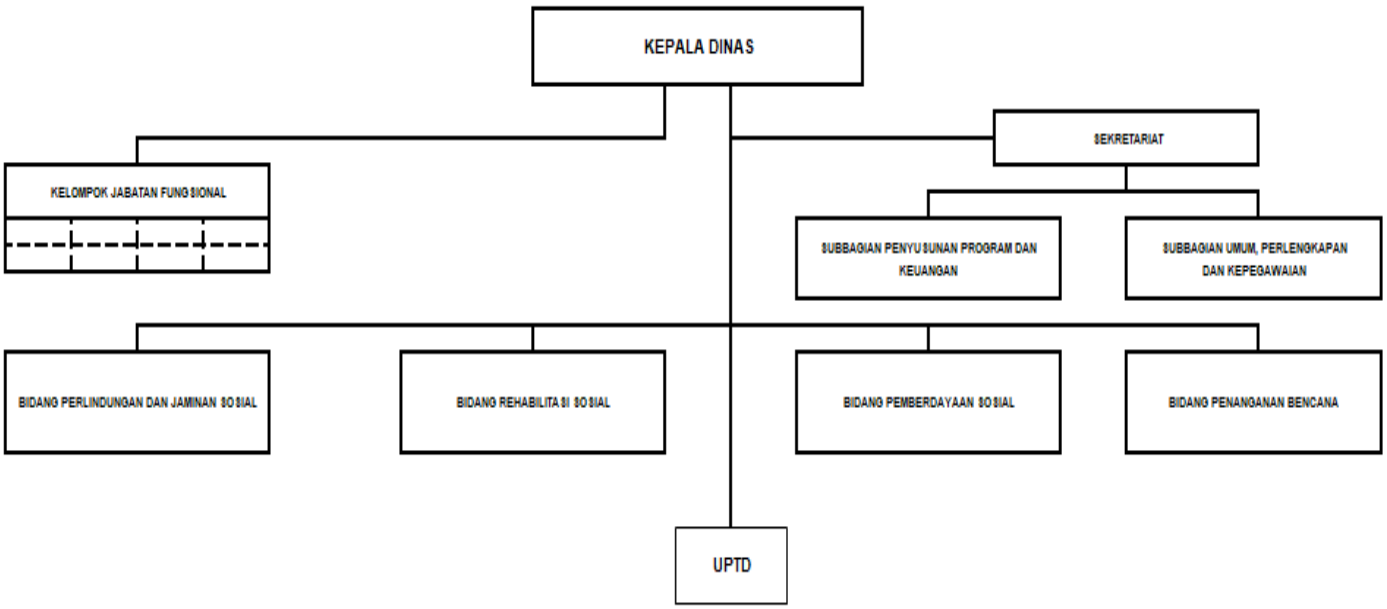
a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT);
b. Pengumpulan Sumbangan dalam daerah;
c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah;
d. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
g. Pemeliharaan Anak-anak terlantar;
h. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
j. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana; dan
k. Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri atas:
    1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
    2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
f. Bidang Penanganan Bencana;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
i. UPTD.

`Tabel 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan



Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Menurut jenis kelamin terdiri dari :
   - Laki-laki : 13 orang
   - Perempuan : 10 orang
2. Menurut golongan terdiri dari :
   - Golongan IV : 6 orang
   - Golongan III : 15 orang
   - Golongan II : 2 orang
3. Menurut eselon terdiri dari :

- Eselon IV : 2 orang
- Eselon III : 5 orang
- Eselon II : 1 orang

4. Menurut pendidikan terdiri dari :

- SLTA : 3 orang
- D.III : 2 orang
- S-1 : 13 orang
- S-2 : 5 orang

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibantu dengan tenaga honorer/kontrak bidang administrasi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Adapun keberadaan / eksisting Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Data Existing Pegawai Dinas Sosial

NO URUT	NAMA JABATAN	STATUS ASN		KELAS JABATAN
		PNS	HONORER	
1	KEPALA DINAS	1	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	5	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	8
5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	5
7	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	6
13	SEKRETARIS	1	-	13
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	9
15	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	3	7
16	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	5
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	9
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	7
	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3	5
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	11
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	11
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
37	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
38	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	5	5
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	11
42	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
43	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	1	6
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-	11

48	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	3	7
49	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1	5
JUMLAH		23	21	

1.3 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 868);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nommor 120);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
26. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten

Seruyan Tahun 2025 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 Nomor 18).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dimaksudkan untuk :

1) Menentukan penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial Tahun 2026;
2) Melaksanakan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2) Mewujudkan Harmonisasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial Tahun 2026;
3) Memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dalam RENJA telah memuat Indikator dan Target Kinerja (Capaian, Outcome dan Output), Kelompok Sasaran, Lokasi dan Pagu Indikatif serta Prakiraan Maju dan mendukung Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 adalah untuk :

1) Sebagai arahan bagi Dinas untuk melaksanakan Pembangunan Daerah bidang kesejahteraan sosial dalam merumuskan dan menyusun Perencanaan serta partisipasi dalam Pembangunan Daerah Tahun 2026;
2) Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Perubahan (KUAP) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2026, dan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
3) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan dan keterpaduan Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan

Pembangunan Daerah secara umum dan secara khusus untuk Pembangunan bidang kesejahteraan sosial;

4) Instrumen bagi Dinas Sosial untuk mengukur target kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib bidang Sosial pada Pemerintahan Daerah;
5) Instrumen bagi Dinas Sosial sebagai acuan penyusunan laporan LPPD, LKjIP, dan LKPJ.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun dalam 4 (empat) bab, sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

Memuat latar belakang, gambaran umum organisasi, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026.

Bab. II Evaluasi Rencana Kerja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat Evaluasi Terhadap Capaian Renstra Dinas Sosial, Evaluasi Terhadap Hasil Renja Triwulan II Tahun 2026, Evaluasi Terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2026, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2026, dan Penelaahan Terhadap Kebijakan / Perubahan RKPD.

Bab. III Rencana Kerja dan Pendanaan

Memuat Tujuan Dan Sasaran Perubahan Renja Dinas Sosial, Program Dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan Matrik Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Sosial, Program Dan Kegiatan Pendukung Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM), Integrasi Program Dinas Sosial Pendukung Program Prioritas Janji Politik Bupati, Janji Politik

Gubernur Dan Janji Politik Presiden Tahun 2026 dan Rekapitulasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Dan Aspirasi Masyarakat.

Bab. IV Penutup

Memuat uraian tentang hal – hal yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak agar Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 berdaya guna.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Peran dinas sosial sebagai fasilitator dan dinamisator dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan dapat terwujud secara adil dan profesional melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat spesifik yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi dinas sosial. Selain itu juga perencanaan kegiatan skala prioritas yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, sesuai dengan hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana berdasarkan indikator kinerja, namun demikian dalam rangka pelaksanaannya masih ada kendala yaitu faktor anggaran yang di alokasi Dinas Sosial belum maksimal dimana komposisi dan struktur anggaran yang diusulkan sering kali tidak dapat terealisasi seluruhnya. Hal ini membawa konsekuensi perlunya revisi terhadap program dan kegiatan yang sudah di usulkan. Optimalisasi hasil kegiatan menjadi berkurang disebabkan alokasi anggaran yang terbatas sehingga mempengaruhi pencapaian target yang telah di tentukan. Hal ini diharapkan menjadi pertimbangan pemangku kebijakan agar alokasi anggaran untuk Dinas Sosial dapat di maksimalkan sesuai dengan yang diusulkan melalui Renja.

2.1 EVALUASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis periode Tahun 2025-2029 yang disajikan pada sasaran merupakan pelaksanaan Tahun kedua dari Rencana Pembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2026 (tahun kedua)
Dengan Target Jangka Menengah / Renstra

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2026	REALISASI CAPAIAN 2026	TARGET RENSTRA TAHUN KE-2	CAPAIAN KEMAJUAN / KEMUNDURAN
1	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	%	100	95,07	100	-4,95
2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	60	n.a	60	n.a

Sasaran Kinerja 1, Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk Tahun ke-2 pencapaian kinerja jangka menengah Renstra 2025-2029 target kinerja penanganan PPKS terealisasi 95,07% dari target kinerja 100%, target tidak tercapai sebesar minus 4,95%. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 56.759 orang dari target PPKS yang terdata 59.703 orang.

Sasaran Kinerja 2, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Untuk Tahun ke-2 pencapaian kinerja jangka menengah Renstra 2025-2029 target kinerja Nilai SAKIP belum ada data yang bisa disajikan karena belum ada Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh APIP Kabupaten Seruyan.

2.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Berikut ini capaian indikator kinerja utama pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2026 yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan II Tahun 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN KINERJA (IKU)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	%	100	95,07	Sangat Baik
2		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Angka	60	n.a	Baik

Sasaran Kinerja 1, Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Capaian realisasi kinerja Dinas Sosial pada tahun 2026 mencapai 95,07% dari target kinerja 100% termasuk dalam kategori **Sangat Baik** meskipun mungkin upaya yang dilakukan belum optimal. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 56.759 orang dari target PPKS yang terdata 59.703 orang. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar target kinerja utama telah tercapai sesuai perencanaan.

Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang menjadi sasaran utama program dan layanan kesejahteraan sosial dikategorikan dalam 12 kelompok Pemerlu Atensi Sosial (12 PAS). Kelompok-kelompok ini membutuhkan perhatian khusus dalam mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan. **Peningkatan kualitas layanan** yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial meliputi pemenuhan hidup layak (kebutuhan dasar), dukungan psikososial dengan pendampingan oleh pekerja sosial (Peksos) dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan, bantuan sosial dan bantuan modal usaha untuk kemandirian. Secara umum pelayanan sosial yang telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2026 terhadap 12 kelompok rentan berupa :

1. **anak-anak rentan**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi anak terlantar/ anak difabel / anak yatim piatu (YAPI), pendampingan penyelesaian kasus untuk anak bermasalah hukum (ABH)/ anak korban tindak kekerasan/ anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), pelatihan bagi anak putus sekolah dan bantuan sosial untuk anak rentan. Jumlah PPKS yang ditangani 62 orang anak.
2. **difabel**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi penyandang disabilitas, pemberian alat bantu untuk penyandang disabilitas fisik, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi dan reunifikasi untuk penyandang disabilitas mental dan bantuan sosial untuk penyandang disabilitas. Jumlah PPKS yang ditangani 42 orang.
3. **lansia telantar**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi lansia, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk lansia. Jumlah PPKS yang ditangani 55 orang.
4. **berpendapatan rendah**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) bagi gelandangan / pengemis / pemulung, layanan kedaruratan, rujukan, rehabilitasi, reunifikasi dan bantuan sosial untuk gepeng. Jumlah PPKS yang ditangani 2 orang.
5. **korban bencana**, berupa pelayanan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (pelayanan SPM) penyediaan makanan dan sandang bagi korban bencana alam/ bencana sosial, Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan, Pelayanan Dukungan Psikososial / trauma healing, mitigasi bencana melalui pembinaan KSB dan TAGANA. Jumlah PPKS yang ditangani 22 orang.
6. **mereka yang membutuhkan afirmasi khusus**, tidak ada Kelompok Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Seruyan.

7. **warga binaan**, tidak ada data warga binaan Narapidana (Napi) dan Narapidana Teroris (Napiter).
8. **korban kekerasan**, berupa pelayanan sosial fasilitasi penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Keluarga (pemulangan ke daerah asal) untuk Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking dan pendampingan khusus penyelesaian kasus. Jumlah PPKS yang ditangani 2 orang / kasus kejadian.
9. **korban NAPZA dan HIV/AIDS**, koordinasi dengan Dinas Sosial dan Puskesmas untuk kerahasiaan data dan bentuk bantuan sosial yang bisa disalurkan (kebutuhan dasar / penguatan ekonomi). Jumlah PPKS yang ditangani 3 orang / kasus kejadian.
10. **masyarakat yang bermasalah sosial**, berupa pemberian pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi (pendampingan khusus penyelesaian kasus) dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya. Jumlah PPKS yang ditangani 1 keluarga / kasus aduan.
11. **perempuan rentan**, berupa pelayanan pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan sosial kewirausahaan untuk kemandirian Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE). Jumlah PPKS yang ditangani 7 orang.
12. **fakir miskin**, berupa perlindungan dan jaminan sosial untuk penduduk yang masuk peringkat kesejahteraan desil 1-5 DTSEN, penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, PBI JKN KIS, Bansos YAPI dan Bansos Lainnya, pemutakhiran data KPM agar bansos tepat sasaran, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk kemandirian keluarga. Jumlah PPKS yang ditangani 56.563 orang.

Sasaran Kinerja 2, Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

Pada Tahun 2026 belum ada data yang disajikan karena belum ada Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh APIP Kabupaten Seruyan

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau target, baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, dan menjadi cerminan prioritas strategis sebuah organisasi, seperti pemerintah, untuk mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut ini capaian indikator kinerja kunci pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2026 yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2026 TW 1	Realisasi Tahun 2026 TW 2	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan	Formula Perhitungan
	INDIKATOR KINERJA KUNCI							
	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100	95,69	99,59	DINSOS	Tercapai target	∑Layanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan /∑Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Standar X 100%
2	Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan	Persen	0	0	0	DINSOS	Tidak tercapai target, karena karena tidak ada penganggaran.	∑Penyelenggara PUB atau UGB yang tertib izin sumbangan / ∑Penyelenggara PUB atau UGB yang terdata x 100%
3	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Persen	100	10	0	DINSOS	Tidak tercapai target, SDM Kesos yang diintervensi 8 orang dari 77 SDM Kesos	∑SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial / ∑SDM Kesejahteraan Sosial yang terdata X 100%
4	Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Persen	100	33	17	DINSOS	Tercapai target, realisasi 3 lembaga yang mendapat pembinaan dan peningkatan kompetensi kelembagaan, dari target 6 lembaga	∑Lembaga yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial / ∑Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdata X 100%
5	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Persen	100	0	67	DINSOS	Melampaui target dengan penanganan 2 kasus pekerja terlantar	Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan pemulangan dan Layanan Psikososial / Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang didata X 100%
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	13	37	DINSOS	Tercapai target, Data disabilitas terlantar yang mendapat layanan SPM target 30 realisasi 15 orang	∑Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / ∑Penyandang Disabilitas Terlantar yang terdata x 100%
7	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	13	62	DINSOS	Melampaui target, Data anak terlantar yang mendapat layanan SPM target 8 realisasi 6 orang	∑Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / ∑Anak Terlantar yang terdata x 100%
8	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	20	40	DINSOS	Melampaui target, Data Lanjut usia terlantar yang mendapat layanan SPM target 10 realisasi 6 orang	∑Lanjut usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / ∑Lanjut Usia Terlantar yang terdata x 100%
9	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	25	25	DINSOS	Tercapai target,Data Gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan SPM target 4 realisasi 2 orang	∑Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / ∑ Gelandangan pengemis yang terdata x 100%
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100	0	0	DINSOS	Tidak tercapai target karena menyesuaikan dengan kasus yang terjadi / permintaan layanan	∑Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial /∑Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

								lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terdata X 100%
11	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	100	99,05	98,27	DINSOS	Melampaui target, karena adanya graduasi (tidak lagi memenuhi syarat) dan tidak salur (tidak melakukan transaksi / gagal verifikasi) Penerima Bansos PKH, Program Sembako dan PBI sebanyak 56.563 jiwa dari target 57.558 jiwa	∑Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / ∑Penerima Manfaat yang terdata x 100%
12	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	Persen	70	10	10	DINSOS	Tidak tercapai target, 1 Kecamatan yang melaksanakan pemutakhiran data (Kec. Seruyan Hilir)	∑kecamatan yang dilaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin / ∑Kecamatan di Kabupaten x 100%
13	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	Persen	1,5	23,67	22,82	DINSOS	Melampaui target, data Desil 1-5 per Juni 2026 sebanyak 63.287 orang berbanding data Desil 1-5 per desember 2025 sebanyak 81.994 orang	∑ Keluarga Miskin dan Rentan yang Tergraduasi dari kemiskinan/ ∑Keluarga Miskin dan Rentan yang terdata x 100%
14	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persen	100	0	0	DINSOS	Tidak tercapai target, telah dilaksanakan asesment kelayakan, rencana penyaluran UEP di triwulan III	∑Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi / ∑Penerima Manfaat yang terdata x 100%
15	Persentase korban bencana alam, sosial dan/non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Persen	100	5	22	DINSOS	Tidak tercapai target, Target 100 orang, realisasi 0 orang korban bencana alam + 22 orang korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	∑Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana / ∑Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terdata X 100%
16	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	Persen	100	5	17	DINSOS	Target 100 orang, realisasi 22 orang korban bencana alam / bencana sosial yang mendapat layanan pemulihan sosial (layanan psikososial traumahealing dan bantuan trauma healing untuk anak)	∑ Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial / ∑ Korban Bencana yang terdata x 100%
17	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Persen	100	63	63	DINSOS	Sosialiasi kesiapsiagaan bencana dan Bansos yang sudah dilaksanakan di Kampung Siaga Bencana dan TAGANA	∑Masyarakat KSB di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya / ∑Masyarakat KSB di daerah rawan bencana yang terdata X 100%
18	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	Persen	100	0	0	DINSOS	Direncanakan RAK pada triwulan III	∑Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik dalam 1 tahun / ∑Taman Makam Pahlawan Nasional di Kabupaten Seruyan x 100%
19	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Orang	30	4	15	DINSOS	Data Penyandang Disabilitas terlantar yang mendapat layanan SPM sd. Triwulan II	∑Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti
20	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	8	1	6	DINSOS	Data Anak terlantar yang mendapat layanan SPM sd. Triwulan II	∑Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
21	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	10	2	6	DINSOS	Data Lanjut usia terlantar yang mendapat layanan SPM sd. Triwulan II	∑Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti
22	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Orang	4	1	2	DINSOS	Data Gelandangan dan pengemis yang mendapat pelayanan SPM sd. Triwulan II	∑Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti
23	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Orang	100	5	22	DINSOS	Data korban bencana sosial / bencana alam yang mendapat pelayanan SPM sd. Triwulan II sebanyak 22 orang	∑Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti

2.2 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Hasil evaluasi pencapaian kinerja urusan sosial sampai dengan 2026 bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan Renstra Dinas Sosial, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4 (E.81)
Evaluasi Terhadap Hasil RENJA Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan

No		Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RENSTRA pada Tahun 2030 (Akhir Periode RENSTRA)		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA-SKPD Tahun Lalu (Tahun 2025)		Target Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA-SKPD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RENJA-SKPD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2026 (%)	
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14 = 13		15=14/6 x100%	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%
		1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			30.860.085.778		5.973.632.350		5.985.474.567		896.176.710		1.560.253.382						2.456.430.092		2.456.430.092	20,01	7,96
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			27.215.367.148		5.013.245.500		5.399.386.067		873.268.411		1.449.835.282						2.323.103.693		2.323.103.693	25,87	8,54
			Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100		100		100		95,69		99,59						99,59		99,59		99,59	
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			58.000.000		-		48.138.700		3.500.000		4.335.400						7.835.400		7.835.400	9,72	13,51
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		4		20		0								0		0		0	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		2		1		0								0		0		0	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	24		10		4		6		1						7		7		29,17	
		1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			11.200.000		-		-		-		-						-		-	0	0
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12		4		20		0								0		0		0	
		1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.800.000		-		-		-		-						-		-	0	0
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6		2		1		0								0		0		0	

		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)																						
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			34.000.000		-		48.138.700		3.500.000		4.335.400						7.835.400		7.835.400	29,17	23,05
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	24		10		4		6		1						7		7		29,17	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.862.779.289		3.517.951.426		4.092.797.767		709.629.411		1.081.466.653						1.791.096.064		1.791.096.064	100	8,19
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan baik	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		26		25		26		26						26		26		100	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.862.779.289		3.517.951.426		4.092.797.767		709.629.411		1.081.466.653						1.791.096.064		1.791.096.064	100	8,19
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		26		25		26		26						26		26		100	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		27.000.000		77.655.000		-		-						-		-	0	0
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		60		63		0								0		0		0	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		27.000.000		77.655.000		-		-						-		-	0	0
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		60		63		0								0		0		0	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.118.481.091		657.389.584		320.819.900		50.539.000		129.625.959						180.164.959		180.164.959	29,5	16,11
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		2		2		2		2						4		4		16	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		2		3		3		3						6		6		17,14	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30		2		2		2		2						4		4		13,33	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		2		3		3		3						6		6		30	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		3		3		3						6		6		60	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15		0		1406		0								0		0		0	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		50		50		14		28						42		42		70	

1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.716.290		13.605.000		2.747.300		-		2.737.000					2.737.000		2.737.000	16	21,52
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		2		2		2		2					4		4		16	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			289.363.293		217.666.500		111.142.000		-		23.467.000					23.467.000		23.467.000	17,14	8,11
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	35		2		3		3		3					6		6		17,14	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			42.365.550		20.548.000		7.993.500		-		2.983.000					2.983.000		2.983.000	13,33	7,04
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	30		2		2		2		2					4		4		13,33	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			70.834.500		33.155.000		11.642.000		-		5.498.000					5.498.000		5.498.000	30	7,76
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		2		3		3		3					6		6		30	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			114.151.930		77.192.500		19.638.100		-		8.871.000					8.871.000		8.871.000	60	7,77
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		3		3		3					6		6		60	
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			30.000.000		-		-		-		-					-		-	0	0
	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	15		0		1406		0							0		0		0	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			559.049.528		295.222.584		167.657.000		50.539.000		86.069.959					136.608.959		136.608.959	70	24,44
	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		50		50		14		28					42		42		70	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			160.000.000		-		-		-		-					-		-	0	0
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0							0		0		0	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		1		0							0		0		0	
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0							0		0		0	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			20.000.000		-		-		-		-					-		-	0	0
	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0							0		0		0	
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			90.000.000		-		-		-		-					-		-	0	0
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		1		0							0		0		0	

	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			50.000.000		-		-		-		-					-		-	0	0
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0							0		0		0	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.461.616.768		679.908.990		688.318.700		109.600.000		157.927.970					267.527.970		267.527.970	48,58	7,73
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		800		850		300		380					680		680		136	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		1		1		1		1					2		2		13,33	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		3		3		3		3					6		6		40	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	40		1		1		1		1					2		2		5	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.660.000		15.015.000		8.800.000		-		6.000.000					6.000.000		6.000.000	136	51,46
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		800		850		300		380					680		680		136	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			259.090.500		62.705.900		29.802.000		-		11.620.650					11.620.650		11.620.650	13,33	4,49
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		1		1		1		1					2		2		13,33	
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			102.025.000		19.399.600		17.910.000		-		6.900.000					6.900.000		6.900.000	40	6,76
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	15		3		3		3		3					6		6		40	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.088.841.268		582.788.490		631.806.700		109.600.000		133.407.320					243.007.320		243.007.320	5	7,87
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	40		1		1		1		1					2		2		5	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			554.490.000		130.995.500		171.656.000		-		76.479.300					76.479.300		76.479.300	13	13,79
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		10		10		1		4					4		4		40	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	4		4		4		2		1					1		1		25	

				atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)																					
				Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3		0		0		0								0		0		0		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		0		10		0								0		0		0		
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		1		0								0		0		0		
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				92.750.000		71.421.300		145.856.000		-		61.594.300						61.594.300		61.594.300	40	66,41	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		10		10		10		1		4						4		4		40		
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				136.740.000		59.574.200		25.800.000		-		14.885.000						14.885.000		14.885.000	25	10,89	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		4		4		4		2		1						1		1		25		
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel				30.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		3		0		0		0								0		0		0		
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		6		0		10		0								0		0		0		
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		3		0		1		0								0		0		0		
	1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**				**695.090.030**		**288.832.200**		**94.405.000**		**2.500.000**		**12.298.800**						**14.798.800**		**14.798.800**	**11,54**	**2,13**	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan (%)		500		40		100		0		0						0		0		0		
			Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)		500		167		100		33		17						50		50		10		
			Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)		500		91		100		10		0						10		10		2		

	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			53.196.100		14.310.800		-		-		-					-		-	0	0
		Terlaksananya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	75		8		50		0								0		0		0	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			53.196.100		14.310.800		-		-		-					-		-	0	0
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	75		8		50		0								0		0		0	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			641.893.930		274.521.400		94.405.000		2.500.000		12.298.800					14.798.800		14.798.800	14,42	2,31
		Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10		5		2		0		0						0		0		0	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	31		10		7		2		1						3		3		9,68	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		2		4		0		4						4		4		40	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	100		0		20		8		0						8		8		8	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			93.780.850		18.158.200		15.570.000		-		4.370.000					4.370.000		4.370.000	0	4,66
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10		5		2		0		0						0		0		0	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			423.086.080		251.891.800		62.954.000		2.500.000		3.653.400					6.153.400		6.153.400	9,68	1,45

		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	31		10		7		2		1						3		3		9,68	
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			52.496.500		4.471.400		4.315.000		-		4.275.400						4.275.400		4.275.400	40	8,14
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		2		4		0		4						4		4		40	
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			72.530.500		-		11.566.000		-		-						-		-	8	0
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	100		0		20		8		0						8		8		8	
	1.06.03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**			**19.879.600**		**2.474.700**		**3.823.000**		**-**		**-**						**-**		**-**	**13,33**	**0**
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani (%)	500		67		100		0		67						67		67		13,4	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			19.879.600		2.474.700		3.823.000		-		-						-		-	13,33	0
		Terlaksananya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		2		4		0		2						2		2		13,33	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			19.879.600		2.474.700		3.823.000		-		-						-		-	13,33	0
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi	15		2		4		0		2						2		2		13,33	

		dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																				
	1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**954.956.200**		**248.179.350**		**166.078.000**		**9.206.099**		**41.646.400**						**50.852.499**		**50.852.499**	**16**	**5,33**
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	500		100		100		25		25						50		50		10	
			Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	500		100		100		13		37						50		50		10	
			Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	500		94		100		13		62						75		75		15	
			Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	500		100		100		0		0						0		0		0	
			Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	500		100		100		20		40						60		60		12	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			783.894.200		205.019.850		161.544.000		9.206.099		37.842.700						47.048.799		47.048.799	26	6
		Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang diberikan kPenyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	385		100		100		19		13						32		32		8,31	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54		6		20		0		0						0		0		0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54		28		25		1								1		1		1,85	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110		14		20		7		5						12		12		10,91	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan	17		15		5		5		2						7		7		41,18	

				Kabupaten/Kota (Orang)																					
				Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	44		5		17		0		3					3		3		6,82	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		4		5		3		3					6		6		50	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		90		20		4		38					42		42		84	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	27		27		5		4		4					8		8		29,63	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		7		5		3		2					5		5		20	
				Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		26		15		6		7					13		13		26	
				Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		3		0		5					5		5		33,33	
		1.06.04.2.01.00 01	Penyediaan Permakanan			187.680.400		42.983.400		22.528.000		-		7.490.000						7.490.000		7.490.000	8,31	3,99	
			Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal	385		100		100		19		13					32		32		8,31	

			Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																				
1.06.04.2.01.00 02	Penyediaan Sandang				59.311.200		3.696.500		8.786.000		-		-						-		-	0	0
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54		6		20		0		0						0		0		0		
1.06.04.2.01.00 03	Penyediaan Alat Bantu				126.568.000		42.554.800		42.300.000		3.031.400		-						3.031.400		3.031.400	1,85	2,4
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	54		28		25		1								1		1		1,85		
1.06.04.2.01.00 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				122.527.600		39.153.350		29.174.000		6.174.699		11.925.700						18.100.399		18.100.399	10,91	14,77
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	110		14		20		7		5						12		12		10,91		
1.06.04.2.01.00 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				50.840.400		14.904.100		13.286.000		-		7.724.200						7.724.200		7.724.200	41,18	15,19
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	17		15		5		5		2						7		7		41,18		
1.06.04.2.01.00 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				137.563.400		38.466.100		32.023.000		-		4.371.400						4.371.400		4.371.400	6,82	3,18
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	44		5		17		0		3						3		3		6,82		
1.06.04.2.01.00 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				1.352.000		10.300.000		260.000		-		-						-		-	50	0
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		4		5		3		3						6		6		50		
1.06.04.2.01.00 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				8.216.000		1.733.100		2.739.000		-		1.960.000						1.960.000		1.960.000	84	23,86
	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan	50		90		20		4		38						42		42		84		

			Kabupaten/Kota (Orang)																				
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			4.680.000		-		1.200.000		-		-						-		-	29,63	0
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	27		27		5		4		4					8		8		29,63	
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			12.214.800		-		420.000		-		-						-		-	20	0
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		7		5		3		2					5		5		20	
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			71.900.400		11.228.500		8.628.000		-		4.371.400					4.371.400		4.371.400	26	6,08
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		26		15		6		7					13		13		26	
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			1.040.000		-		200.000		-		-						-		-	33,33	0
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		3		0		5					5		5		33,33	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			171.062.000		43.159.500		4.534.000		-		3.803.700					3.803.700		3.803.700	4	2,22
		Terlaksananya Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		5		20		0							0		0		0	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		20		0							0		0		0	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	12		0		0		0							0		0		0	

				Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																				
				Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0								0		0		0	
				Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		20		10		0								0		0		0	
				Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		0		5		0								0		0		0	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24		0		2		0								0		0		0	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0								0		0		0	
				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4		0		6		0								0		0		0	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		1		3		1		5						6		6		40	

1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			15.000.000		5.310.000		-		-		-						-		-	0	0
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		5		20		0								0		0		0	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang			15.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		20		0								0		0		0	
1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti			15.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		0		0		0								0		0		0	
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			10.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0								0		0		0	
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			40.000.000		33.478.100		-		-		-						-		-	0	0
	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		20		10		0								0		0		0	
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			2.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0
	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	20		0		5		0								0		0		0	

			Kewenangan Kabupaten/Kota	Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																				
		1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			10.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	24		0		2		0								0		0		0	
		1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			10.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0								0		0		0	
		1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			30.000.000		-		-		-		-						-		-	0	0
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4		0		6		0								0		0		0	
		1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			24.062.000		4.371.400		4.534.000		-		3.803.700						3.803.700		3.803.700	40	15,81
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	15		1		3		1		5						6		6		40	
		1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**974.866.000**		**112.635.500**		**142.888.000**		**11.202.200**		**33.975.400**						**45.177.600**		**45.177.600**	**15,43**	**4,63**
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	70		85,71		70		10		10						10		10		14,29	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	500		100		100		0		0						0		0		0	
				Persentase keluarga miskin dan rnetan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	3		4,16		1,5		24		22,82						22,82		22,82		760,67	
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100		99,63		100		99,05		98,27						98,27		98,27		98,27	
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			974.866.000		112.635.500		142.888.000		11.202.200		33.975.400						45.177.600		45.177.600	15,43	4,63
			Tersedianya Pengelolaan Data	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah	193000		82.579		39500		0								0		0		0	

		Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)																				
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	190		38		150		0								0		0		0	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37228		11.232		10000		8.480		8.912						17.392		17.392		46,72	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	20		0		4		2		1						3		3		15	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			252.756.400		59.426.300		-		-		-						-		-	0	0
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	193000		82.579		39500		0								0		0		0	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			123.600.000		5.958.800		12.800.000		-		-						-		-	0	0
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	190		38		150		0								0		0		0	
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			237.510.000		47.250.400		55.196.000		2.630.800		10.133.600						12.764.400		12.764.400	46,72	5,37
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37228		11.232		10000		8.480		8.912						17.392		17.392		46,72	
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			360.999.600		-		74.892.000		8.571.400		23.841.800						32.413.200		32.413.200	15	8,98
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	20		0		4		2		1						3		3		15	
	1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**850.016.300**		**261.853.800**		**150.001.000**		**-**		**22.497.500**						**22.497.500**		**22.497.500**	**11,6**	**2,65**
		Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya (%)	100		100		100		63		63						63		63		63	

			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	500		100		100		5		17						22		22		4,4	
			Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	500		100		100		5		17						22		22		4,4	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			684.697.900		203.019.100		96.473.000		-		18.496.700						18.496.700		18.496.700	9,94	2,7
		Terlaksananya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450		134		100		5		17						22		22		4,89	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	165		127		60		5		17						22		22		13,33	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		56		20		2		11						13		13		26	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	400		122		100		5		17						22		22		5,5	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0								0		0		0	
	1.06.06.2.01.00 01	Penyediaan Makanan			238.992.000		53.649.100		29.441.000		-		12.660.900						12.660.900		12.660.900	4,89	5,3
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	450		134		100		5		17						22		22		4,89	
	1.06.06.2.01.00 02	Penyediaan Sandang			106.526.200		57.842.700		18.589.500		-		5.835.800						5.835.800		5.835.800	13,33	5,48
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan	165		127		60		5		17						22		22		13,33	

		Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																				
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			91.847.300		75.670.000		30.565.000		-		-						-		-	26	0
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		56		20		2		11					13		13		26	
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			135.778.000		15.857.300		13.726.500		-		-						-		-	5,5	0
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	400		122		100		5		17					22		22		5,5	
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			111.554.400		-		4.151.000		-		-						-		-	0	0
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0							0		0		0	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			165.318.400		58.834.700		53.528.000		-		4.000.800						4.000.800		4.000.800	15,72	2,42
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	10		2		2		0		1					1		1		10	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	345		69		69		40		34					74		74		21,45	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			66.955.200		26.418.300		20.512.000		-		-						-		-	10	0
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	10		2		2		0		1					1		1		10	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			98.363.200		32.416.400		33.016.000		-		4.000.800						4.000.800		4.000.800	21,45	4,07
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan	345		69		69		40		34					74		74		21,45	

		dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)																				
	1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**			**149.910.500**		**46.411.300**		**28.893.500**		**-**		**-**						**-**		**-**	**46,67**	**0**
		Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik (%)	500		100		100		0		0						0		0		0	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			149.910.500		46.411.300		28.893.500		-		-						-		-	46,67	0
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		3		0								0		0		0	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	5		1		3		0		7						7		7		140	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		3		0								0		0		0	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			76.961.300		38.558.800		-		-		-						-		-	0	0
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	10		2		3		0								0		0		0	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			39.718.200		3.031.400		28.893.500		-		-						-		-	140	0
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	5		1		3		0		7						7		7		140	
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			33.231.000		4.821.100		-		-		-						-		-	0	0
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	5		1		3		0								0		0		0	
		JUMLAH			**30.860.085.778**		**5.973.632.350**		**5.985.474.567**		**896.176.710**		**1.560.253.382**						**2.456.430.092**		**2.456.430.092**		
		Rata-rata capaian kinerja (%)																				**20,01**	**7,96**
		Predikat kinerja																				**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
1. Penguatan Kolaborasi / kerjasama

2. Adanya perlindungan dan jaminan sosial yang bersifat reguler (APBN) 3. Adanya Bantuan Sosial ATENSI rehabilitasi sosial
Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1. Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat dan perlu verifikasi dan validasi data kembali 2. Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS 3. Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara bagi PPKS sehingga terkadang kesulitan ketika mengevakuasi atau memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan minimnya anggaran dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan rumah singgah.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : 1. Verifikasi dan validasi data DTSEN 2. Peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial melalui pembinaan, monev, pelatihan dan UKOM 3. Koordinasi dengan PUPR terkait penyelesaian pembanguanan Rumah SInggah
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA-SKPD berikutnya : 1. Pemutakhiran Data dan Manajemen Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2. Peningkatan Efektivitas Program Rehabilitasi, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Sosial 3. Perbaikan Kualitas Pelayanan dan Sarana Prasarana

2.3 EVALUASI TERHADAP REALISASI ANGGARAN TAHUN 2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Seruyan telah menetapkan program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Anggaran Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Seruyan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.985.474.567,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.456.430.092,00 atau 41,04%, dimana belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal, sebagaimana rincian tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Triwulan II TA 2026

No	Jenis Belanja Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI	Rp5.923.954.567,00	Rp2.456.430.092,00	41,47
	Belanja Pegawai	Rp4.092.797.767,00	Rp1.791.096.064,00	43,76
	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.772.656.800,00	Rp665.334.028,00	37,53
	Belanja Hibah	Rp0,00	Rp0,00	0,00
	Belanja Bantuan Sosial	Rp58.500.000,00	Rp0,00	0,98
2	BELANJA MODAL	Rp61.520.000,00	Rp0,00	1,03
	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp5.985.474.567,00	Rp2.456.430.092,00	41,04
JUMLAH		Rp5.985.474.567,00	Rp2.456.430.092,00	41,04

Pencapaian kinerja belanja daerah, dapat dilihat pada masing-masing jenis belanja pada grafik dibawah ini dimana Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. Rp5.923.954.567,00 mencapai realisasi sebesar Rp2.456.430.092,00 atau sebesar 41,47%. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp61.520.000,00 belum terealisasi sebesar Rp.0,00 atau sebesar 0%.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam Triwulan II tahun 2026 dalam kaitannya dengan pencapaian terhadap penyerapan pagu anggaran belanja yang telah ditetapkan untuk mewujudkan indikator kinerja yang diharapkan. Kendala dan permasalahan tersebut didasarkan pada kondisi nyata gambaran umum, dengan uraian sebagai berikut.

1. Terbatasnya tersedianya dana pada Kas Daerah untuk sumber dana DBH, PAD, TAD pada triwulan awal, menyebabkan bidang teknis menunda pelaksanaan kegiatan / tidak melaksanakan kegiatan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
2. Minimnya Pagu anggaran Dinas Sosial sebagai salah satu OPD urusan pemerintahan wajib yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial
3. Belum ada kepastian / ketentuan kegiatan yang bersumber dana Silpa Umum bisa terbayar
4. Setelah dilaksanakan efisiensi anggaran ada beberapa hal yang akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kinerja Dinas Sosial, antara lain:
    a. Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk penanganan penyadang disabilitas / ODGJ, lanjut usia, anak terlantar dan gelandangan / pengemis, Orang terlantar menjadi tidak maksimal karena keterbatasan anggaran.
    b. Minimnya Biaya distribusi penyaluran bantuan sosial untuk PPKS dan korban bencana alam / sosial dan fasilitasi penyaluran bantuan untuk PKH / program sembako BPNT
    c. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak maksimal,

Upaya mengatasi permasalahan agar kedepannya penyerapan anggaran dan capaian kinerja lebih optimal dengan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu penganggaran dana untuk verifikasi dan validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pemutakhiran data DTKS SIKS-NG
2. Perlu ditingkatkan keakuratan perhitungan kebutuhan anggaran sehingga pada saat perubahan anggaran tidak lagi terjadi kelebihan / kekurangan penganggaran.
3. Mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dalam proses administrasi penatausahaan keuangan untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan administrasi dalam proses pencairan dana,

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Adanya kegiatan Asistensi / Pendampingan dan Rekonsiliasi sehingga pelaporan dapat lebih akurat dan tepat waktu.

2.4 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.4.1 Kinerja Pelayanan Dari Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Standar Nasional penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) diatur secara ketat melalui instrumen Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kotai mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Target penerima layanan SPM bidang Sosial setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Target Capaian

Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Seruyan. Adapun realisasi SPM Bidang Sosial tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Bentuk Layanan Dasar	Target NSPK	Target Penerima Layanan	Jumlah Penerima Layanan	Kendala
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1. Layanan data dan pengaduan 2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat 3. Penyediaan permakanan 4. Penyediaan sandang 5. Penyediaan alat bantu 6. Penyediaan perbekalan kesehatan 7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga 9. Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan 10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga 12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 13. Layanan Rujukan	100 %	30	15	1. terbatasnya kuota Rehabilitasi Sosial Dasar (pelayanan SPM) untuk rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang disediakan oleh Panti Rehab pemerintah provinsi (hanya 5 orang per tahun), menyebabkan perlu kerjasama dengan Panti Rehabilitasi swasta Panti Joint Adulum Ministry (JAM) yang memerlukan dana Bantuan Sosial untuk biaya hidup selama menjalani rehabilitasi 2. belum ada penyediaan perbekalan kesehatan untuk kasus keterlantaran, 3. biaya pendampingan proses hukum ABH
2.	Rehabilitasi sosial dasaranak telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		100 %	8	6	
3.	Rehabilitasi sosial dasarlanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjutusia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		100 %	10	6	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti		100 %	4	2	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korbanbencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	1. Penyediaan permakanan 2. Penyediaan sandang 3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi 4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 5. Pelayanan dukungan Psikososial	100 %	100	22	1. upaya perlindungan sosial untuk mengurangi / kerentanan sosial bagi korban bencana, diperlukan bantuan logistik pemberikan paket permakanan kepada korban bencana sebelum ditetapkan status tanggap darurat bencana oleh Kepala. 2. Kondisi tenda pengungsi yang sudah kurang layak

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang banyak yang bersifat insidental merujuk terutama layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana yang waktu kejadiannya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Layanan ini baru aktif saat terjadi peristiwa darurat, sehingga sulit diprediksi perhitungannya secara rutin.

2.4.2 Kinerja Pelayanan Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Triwulan II Tahun 2026

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan

focus sasaran pada pembangunan Sumber Daya Manusia dibidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik secara fisik maupun sosial psychologis yang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial atau yang termasuk pada kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ada 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sedangkan yang termasuk kedalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi 12 (dua belas) potensi.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang disesuaikan dengan arah kerja baru Kemnterian Sosial di rekategorikan menjadi 12 PAS atau 12 Pemerlu Atensi Sosial yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial) Triwulan II Tahun 2026

NO	PEMERLU ATENSI SOSIAL		TERDATA	TERTANGANI	BIDANG TEKNIS
1	ANAK - ANAK RENTAN	1. Balita terlantar	1	1	Rehabilitas Sosial
		2. Anak terlantar	2	2	Rehabilitas Sosial
		3. Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	16	16	Rehabilitas Sosial
		4. Anak difable,	42	15	Rehabilitas Sosial
		5. Anak korban tindak kekerasan,	3	3	Rehabilitas Sosial
		6. Anak jalanan,	0	0	Rehabilitas Sosial
		7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	0	0	Rehabilitas Sosial
		8. Anak Yatim Piatu (YAPI)	25	25	Rehabilitas Sosial
2	DIFABEL	9. Penyandang Disabilitas	320	42	Rehabilitas Sosial
3	LANSIA TERLANTAR	10. Lanjut Usia Terlantar / Miskin	1694	55	Rehabilitas Sosial
4	BERPENDAPATAN RENDAH	11. Gelandangan / OT	3	1	Rehabilitas Sosial
		12. Pengemis	1	0	Rehabilitas Sosial
		13. Pemulung	3	1	Rehabilitas Sosial
5	KORBAN BENCANA	14. Bencana Alam	0	0	Penanganan Bencana
		15. Bencana Sosial	22	22	Penanganan Bencana
6	AFIRMASIS KHUSUS	16. Kelompok Adat Terpencil (KAT)	tdk ada	tdk ada	Pemberdayaan Sosial
7	WARGA BINAAN / Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	17. Narapidana (NAPI)	0	0	Rehabilitas Sosial
		18. Narapidana Teroris (NAPITER)	0	0	Rehabilitas Sosial
8	KORBAN KEKERASAN	19. Korban tindak kekerasan	2	2	Rehabilitas Sosial
		20. Korban traffiking	0	0	Rehabilitas Sosial
		21. Pekerja migran bermasalah sosial	0	0	Rehabilitas Sosial
9	KORBAN NAPZA DAN HIV/AIDS	22. Korban penyalahgunaan NAPZA	1	1	Rehabilitas Sosial
		23. Penderita HIV/AIDS	2	2	Rehabilitas Sosial
10	BERMASALAH SOSIAL	24.Kelompok minoritas	0	0	Rehabilitas Sosial
		25. Keluarga bermasalah sosial psikologis	1	1	Resos dan Dayasos
11	PEREMPUAN RENTAN	26. Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE)	7	7	Rehabilitas Sosial
		27. Tuna Susila	0	0	Rehabilitas Sosial
12	FAKIR MISKIN	28. Fakir Miskin / rentan (penerima bansos)	57.558	56.563	Perlindungan dan Jaminan Sosial
JUMLAH			**59.703**	**56.759**	

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2026

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	SERTIKAT KOMPETENSI / AKREDITASI	SUMBER DATA
1	Pekerja Sosial (Profesional)	5	1	Data Peksos Dinsos Tahun 2025
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7	3	Data BNBA PSM Kab. Seruyan
3	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	63	63	SK Tagana
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9	3	Daftar Direktori LKS LKSA
5	Karang taruna	56		Data BNBA Karang Taruna Kab. Seruyan
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1		SK Bupati tentang LK3
7	Keluarga pioneer	2		
8	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	3	SK Kemensos tt TKSK
9	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0		
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0		
11	Penyuluh Sosial Masyarakat	3	3	
12	Dunia Usaha	5		Data Dunia Usaha Penyelenggara Kessos / CSR
JUMLAH PSKS		**161**	**76**	

2.4.3 Capaian Kinerja Pelayanan Sarana Sosial

Sarana Sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari LKS dan LKSA sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk masyarakat dan anak-anak tidak mampu atau tidak memiliki keluarga, berikut data LKS yang terdapat di Kabupaten Seruyan :

Tabel 2.9
Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan LKS

LKSA	Capaian Kinerja Pelayanan					
	2020	2021	2022	2023	2025	2026
Lembaga Kesejahteraan Sosial	4	5	5	6	9	8

Pada tahun 2026 Lembaga Kesejahteraan Sosial terdaftar di Dinas Sosial berjumlah 8 LKS yang terdiri dari LKSA Nuruzh zholam, LKSA Mahad Hidayatul Amin, LKSA Hj. Maskacil, LKSA Al Mustaghfirin, LKSA Hidayatul Salikin, LKSA Darul Madani, LKSA Al Ma'arif dan LKS Seruyan Peduli.

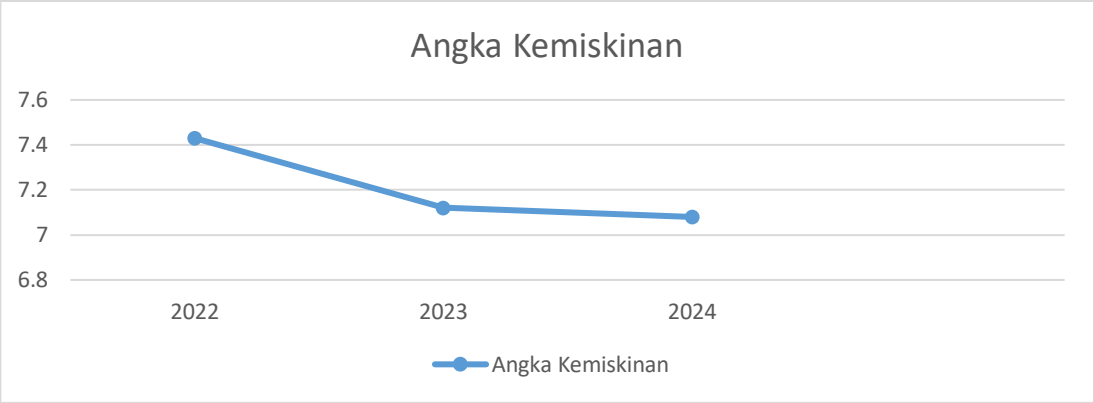
2.4.4 Capaian Atas Asersi Sektor Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar

(*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perbandingan data Kemiskinan di Kabupaten Seruyan tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Data Kemiskinan Kabupaten Seruyan

No	Kemiskinan	2022	2023	2025	Kenaikan / Penurunan
1	Persentase Penduduk Miskin (P0) (Persen)	7,43	7,12	7,08	0,04



Dari grafik dapat dilihat Angka Kemiskinan Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, terlihat dari Persentase penduduk miskin yang turun 0,04% dari angka kemiskinan Tahun 2025 sebesar 7,08% berbanding Tahun 2023 sebesar 7,12%. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan sehingga jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan semakin berkurang, berbanding lurus dengan indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan yang juga menurun.

Kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan finansial, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti

pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan menjadi isu strategis daerah karena dampaknya yang luas dan mendalam terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dari masalah pangan, kesehatan, pendidikan, hingga ketidakstabilan sossial, dampak kemiskinan merembet ke berbagai sektor dan memperburuk kondisi kehidupan secara keseluruhan.

Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintah yang memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Upaya pengentasan kemiskinan haruslah bersifat komprehensif, mencakup penyediaan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanajutan, siklus kemiskinan dapat diputus dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Peranan Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan terkait dengan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan. Tagging Pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial dilaksanakan dalam 5 Program 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan

Langkah strategis yang dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

1. Menurunkan beban pengeluaran, melalui penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, Bansos Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bansos Iklim, Bansos Permakanan, Bansos Sandang, Bansos Alat Bantu penyandang disabilitas, Bansos untuk Korban bencana alam / sosial dan Bansos lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan, melalui Pelatihan kewirausahaan, motivasi dan edukasi, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bansos Barang stimulan usaha, pelatihan bina remaja, pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

2.5 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2026

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana salah satu fungsinya adalah perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2.5.1 Permasalahan Pelayanan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan serta faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain:

a. Faktor Data :
    1. Transisi perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan penggabungan dari beberapa data terkait kesejahteraan sosial, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Regsosek, dan P3KE, mengakibatkan data yang dikelola Dinas Sosial meningkat dan perlu verifikasi dan validasi data kembali.
    2. Pengelolaan Data : BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis belum akurat sehingga memerlukan assesment ulang atau Verifikasi dan Validasi (verivali) ulang. Karena banyak penerima layanan SPM bersifat insidental sehingga menyulitkan perhitungan kebutuhan dan pada akhirnya antara target dan realisasi terdapat perbedaan. Data belum sepenuhnya terintegrasi dalam DTSEN.
    3. Masih ada beberapa Kluster 12 PAS yang belum tertangani yaitu kelompok korban NAPZA dan HIV/AIDS dan warga binaan (Napi/Napiter) karena data yang sensitif / rahasia, PPKS yang tidak mau di akses .

b. Faktor Sumber Daya (SDM Dan Sarpras) :
    1. Minim SDM : Rasio SDM Kesejahteraan Sosial yang tidak sebanding dengan jumlah PPKS
    2. Aplikasi : Belum terbentukan Sistem Pemutakhiran Data Mandiri dan aplikasi penyaluran bansos. (Mempelajari sistem

update data yang melibatkan relawan dan perangkat desa walaupun Dinas sosial sdh ada operator SIKS NG desa/kelurahan)

3. Aplikasi : Digitalisasi Layanan Pengaduan untuk Pelayanan SPM Sosial
4. Sarana : Belum tersedianya rumah singgah atau shelter sementara bagi PPKS sehingga terkadang kesulitan ketika mengevakuasi atau memberikan pelayanan bagi klien ppks disebabkan minimnya anggaran dalam Pembangunan rumah singgah, keterbatasan SDM professional, belum adanya Perda / Perbup yang mengatur pelayanan rumah singgah.
5. Prasarana : Kondisi Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang tidak maksimal Tenda pengungsi dalam kondisi kurang layak.
6. Belum terbentukan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
7. Bentuk adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) pelayanan SPM di tingkat desa / kelurahan / kecamatan, sehingga semua permasalahan sosial langsung ke Dinas Sosial
8. Belum ada Pembentukan Sekolah Rakyat

c. Faktor Penganggaran : Anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dinas sosial terbatas

d. Faktor Kebijakan dan Regulasi : Inpres No. 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, Inpres No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Permensos No. 3 tahun 2025 pemutakhiran dan penggunaan DTSEN untuk bansos, pemberdayaan sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; konsekuensi penggunaan DTSEN yaitu adanya Pemeringkatan (Desil), Penerima bansos berubah, kuota penerima bansos daerah berubah dan mitigasi resiko (protes)

e. Faktor Kolaborasi dan Sinergi : Belum semua PPKS bisa tertangani karena keterbatasan kuota.

2.5.2 Isu Strategis Dinas Sosial Tahun 2026

Berdasarkan telaahan dan analisis dari Identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang menjadi perhatian Dinas Sosial dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Sosial periode 2025-2029. Isu strategis Dinas Sosial umumnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Tabel 2.11
Telaah Isu Strategis Dinas Sosial

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH				ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	KABUPATEN	
Sosial Budaya	Penanganan masalah kesejahteraan sosial belum optimal	Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan	Polarisasi Sosial	*Aging Population* Negara Maju	Kesejahteraan Masyarakat	Penanganan Kemiskinan	Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Untuk dapat mempermudah pemahaman, maka isu-isu strategis Dinas Sosial dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
   Peningkatan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal sebagai antisipasi Peningkatan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan
2. Optimalisasi Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial
   Adapun yang akan dilakukan berupa penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dengan memberikan pelayanan dasar kesehatan dan sosial. Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan Program Kegiatan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial;
3. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Perlunya Peningkatan kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Sosial dalam penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial sebagai bentuk dukungan keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan sosial. Keberadaan pendamping kesejahteraan sosial menjadi salah satu aspek terpenting untuk memastikan bahwa program kesejahteraan sosial sudah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial memiliki beberapa pendamping seperti pendamping rehabilitasi sosial, pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam pelaksanaannya pendampingan yang dilakukan tidak optimal serta belum adanya mekanisme pendampingan dan monitoring lanjutan yang valid dan komprehensif.

4. Peningkatan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
   Melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) SIK-NG berupa pengelolaan data (verifikasi, validasi dan pemutakhiran DTKS), pengelolaan informasi kesejahteraan sosial, fasilitasi bantuan sosial dan kesejahteraan keluarga, sosialisasi bantuan sosial pengembangan ekonomi, peningkatan keaktifan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dan penanganan sistem layanan terpadu penanganan kemiskinan (SLRT).

2.6 PENELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN ATAU PERUBAHAN RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, perubahan kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan keuangan daerah. Telaahan ini menjadi dasar untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial tetap selaras dengan arah pembangunan daerah dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025–2029.

Dalam pelaksanaan Tahun 2026, Dinas Sosial perlu melakukan penajaman terhadap perencanaan, terutama yang berkaitan

dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan korban bencana, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Penyesuaian juga perlu memperhatikan hasil capaian sampai dengan pertengahan tahun, ketersediaan anggaran, perubahan kebutuhan penerima manfaat, serta permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan.

Perubahan Renja Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, dan kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, apabila terdapat target yang belum tercapai, kegiatan yang mengalami keterlambatan, perubahan kebutuhan anggaran, maupun perubahan kondisi penerima manfaat, perlu dilakukan penyesuaian secara terukur tanpa mengurangi pencapaian sasaran utama Dinas Sosial.

Sejalan dengan tujuan Dinas Sosial yaitu “Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)”, maka perubahan kebijakan dan perencanaan perlu difokuskan pada peningkatan penanganan PPKS serta peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Pelaksanaan perubahan juga perlu didukung dengan pemutakhiran data sosial, penguatan koordinasi lintas sektor, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta pengendalian risiko terhadap setiap program, kegiatan dan subkegiatan.

Dengan demikian, Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Seruyan diharapkan mampu meningkatkan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pencapaian kinerja, sehingga pelayanan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Seruyan.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA DINAS SOSIAL

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Seruyan 2025-2029, maka ditentukan tujuan strategis (*strategic goal*) yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi tersebut dan *ultimate outcome* Sektor Pengentasan Kemiskinan yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Seruyan, serta permasalahan dan isu-isu staretgis pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Seruyan yang.

Berikut perumusan tujuan (*intermediate outcome*) dan sasaran Rencana Stategis Dinas Sosial tahun 2025-2029 dengan relevansi terhadap Sasaran RPJMD :

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

NSPK SASARAN RPJMD YG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Menurunnya kemiskinan (Misi I, Sasaran ke-5)	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Indikator Tujuan : Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95%	90%	85%	80%	75%	75%	
		Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Indikator Sasaran : Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Indikator Sasaran : Nilai SAKIP Dinas Sosial	58	60	62	64	66	66	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 (Urusan Wajib Sosial) Renstra Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Sasaran Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani, ditetapkan target merata maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun. Diharapkan kelompok sasaran 12 PAS dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan.

Tujuan 2 (Urusan Penunjang) Renstra Dinas Sosial adalah Mewujudkan tata Kelola Dinas Sosial yang transparan, akuntabel dan kapabel, dengan Indikator Nilai Kematangan Lembaga Dinas Sosial, dan Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan Indikator Nilai SAKIP Dinas Sosial, ditetapkan target menurun secara bertahap dalam setiap tahun. Di harapkan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan sosial dan adminitrasi baik dari segi SDM, anggaran dan sarana / prasarana dapat mendukung tercapainya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2026

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2026 diperlukan perencanaan dan penganggaran yang bisa menyesuaikan dengan perubahan arah kebijakan pemerintah daerah dengan isu efisiensi anggaran secara optimal.

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 disusun menurut Urusan Pemerintahan wajib urusan dasar bidang Sosial. Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pagu Anggaran Belanja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF RENJA	PAGU RKA	PAGU PERUBAHAN RENJA
1.	DINAS SOSIAL	Rp. 5.783.347.586,	Rp5.985.474.567,00	Rp5.985.474.567,00

Berikut ringkasan Belanja pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2026 :

Tabel 3.3
Ringkasan Belanja Perubahan Renja
Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026

BELANJA	PAGU	%
BELANJA OPERASI	Rp5.923.954.567,00	98,97
Belanja Pegawai	Rp4.092.797.767,00	68,38
Belanja Barang dan Jasa	Rp1.772.656.800,00	29,62
Belanja Hibah	Rp0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	Rp58.500.000,00	0,98
BELANJA MODAL	Rp61.520.000,00	1,03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp61.520.000,00	1,03
TOTAL BELANJA	Rp5.985.474.567,00	100,00

Dari perencanaan perubahan rencana kerja pagu anggaran 2026 sebesar Rp5.985.474.567,00 dapat dijabarkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang didasarkan pada potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki, dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika pembangunan daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut dan juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Seruyan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

a. Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan arah kebijakan Renja Dinas sosial Kabupaten Seruyan 2026 maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan Dinas Sosial dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dan lokasi serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana dan lokasi masing-masing kegiatan.
b. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan pagu indikatif merupakan kebutuhan dana bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, setiap tahun sampai dengan Tahun 2026.
c. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Dinas Sosial, selanjutnya dijadikan acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Perencanaan program dalam dokumen Dinas Sosial harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta

isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD, yang di dukung dengan program-program sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
b. Program Pemberdayaan Sosial;
c. Program Rehabilitasi Sosial;
d. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
f. Program Penanganan Bencana;
g. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;

3.2.1 Program Dinas Sosial berdasarkan Urusan Wajib (Urusan Sosial)

Program Kegiatan Utama yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Sosial terdiri atas 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 bidang teknis di Dinas Sosial. Berikut rincian program utama Urusan Wajib :

Tabel 3.4
Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Pelaksana Urusan Wajib Bidang Sosial pada Renja 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		KET
			Target	Pagu	
1	2	4	7	8	17
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				553.189.000,00	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	94.405.000,00	
	2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100		
	3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan	%	100		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	%	100	0	

1.06.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	50	0	
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**%**	**100**	**94.405.000,00**	
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2	15.570.000,00	
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	7	62.954.000,00	
1.06.02.2.03.0005 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	4.315.000,00	
1.06.02.2.03.0006 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK yang meningkat kapasitasnya	Orang	20	11.566.000,00	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani**	**%**	**100**	**3.823.000,00**	
1.06.03.2.01. - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal**	**%**	**100**	**3.823.000,00**	
1.06.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	3.823.000,00	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**100**	**166.078.000,00**	
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
1.06.04.2. - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**%**	**100**	**161.544.000,00**	
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	22.528.000,00	
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	8.786.000,00	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	42.300.000,00	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	29.174.000,00	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	13.286.000,00	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	32.023.000,00	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	260.000,00	
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.739.000,00	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.200.000,00	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	420.000,00	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	8.628.000,00	
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	200.000,00	
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**%**	**100**	4.534.000,00	
1.06.04.2.02.0010 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4.534.000,00	

1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**100**	**138.882.000,00**	
	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	**%**	**100**		
	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	**%**	**70**		
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	**%**	**1,5**		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	**Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**%**	**100**	**138.882.000,00**	
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Orang	39.500	0	
1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10000	44.396.000,00	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	8.800.000,00	
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	4	85.686.000,00	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**%**	**100**	**150.001.000,00**	
	2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	**%**	**100**		
	3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	**%**	**100**		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	**Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota**	**%**	**100**	**96.473.000,00**	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	29.441.000,00	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	18.589.500,00	
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	10	4.151.000,00	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	30.565.000,00	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	13.726.500,00	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	**Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota**	**%**	**100**	**53.528.000,00**	
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Kampung	2	20.512.000,00	
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	69	**33.016.000,00**	
				553.189.000,00	

3.2.2. Program Dinas Sosial berdasarkan Urusan Penunjang

Program Kegiatan yang melaksanakan urusan penunjang terdiri atas 2 (dua) program, 5 (kegiatan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 bidang teknis di Dinas Sosial. Berikut rincian program utama Urusan penunjang :

Tabel 3.5
Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Pelaksana Urusan Penunjang pada Renja 2026

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		KET
			Target	Pagu	
1	2	4	7	8	17

UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				**5.432.285.567,00**	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**5.432.285.567,00**	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**%**	**100**	**5.403.392.067,00**	
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**%**	**100**	**4.092.798.067,00**	
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	25	4.092.798.067,00	
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**%**	**100**	**153.754.600**	
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	5.811.000,00	
1.06.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	111.142.000,00	
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	7.993.500	
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	11.642.000,00	
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	19.638.100,00	
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	167.657.000,00	
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**688.318.700,00**	
1.06.01.208.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	850	8.800.000,00	
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	29.802.000,00	
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	17.910.000,00	
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	631.806.700,00	
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**171.656.000,00**	
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	10	145.856.000,00	
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4	25.800.000,00	
1.06.07 - PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik**	**%**	**100**	**28.893.500,00**	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota**	**%**	**100**	**28.893.500,00**	
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Dokumen	3	0	
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	3	**28.893.500,00**	
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	3	0	
				5.243.501.986,00	

Jumlah program urusan wajib dan urusan penunjang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sebanyak 7 (tujuh) program dan 13 (tiga Belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) Sub Kegiatan. Pemilihan program dan kegiatan sudah berdasarkan kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Kebutuhan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan Tahun 2026 berdasarkan usulan perangkat daerah sebesar **Rp. 5.985.474.567,-**

3.3 MATRIK RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2026 sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 3.6
Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Seruyan tahun 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.06.0.00.0.00.01.0000	**DINAS SOSIAL**							**5.783.347.586,00**	**5.985.474.567,00**	**5.985.474.567,00**	**202.126.981,00**							**8.591.193.184,00**
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**5.783.347.586,00**	**5.985.474.567,00**	**5.985.474.567,00**	**202.126.981,00**							**8.591.193.184,00**
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**5.783.347.586,00**	**5.985.474.567,00**	**5.985.474.567,00**	**202.126.981,00**							**8.591.193.184,00**
1,	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Unit Kerja**				**100 %**	**100 %**	**5.214.608.486,00**	**5.399.386.067,00**	**5.403.392.067,00**	**188.783.581,00**							**6.706.213.184,00**
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	0,00	77.655.000,00	77.655.000,00	77.655.000,00							0,00
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan*				63 Paket	63 Paket	0,00	77.655.000,00	77.655.000,00	77.655.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00
		[Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan	***Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan***	***100***	***95.77***	***100***			***5.214.608.486,00***	***5.321.731.067,00***	***5.325.737.067,00***	***111.128.581,00***						***100***	***6.706.213.184,00***

		Daerah Pada Perangkat Daerah]	***administrasi perkantoran***															
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu				100 %	100 %	0,00	48.138.700,00	49.080.700,00	49.080.700,00							44.487.250,00
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				4 Laporan	4 Laporan	0,00	48.138.700,00	49.080.700,00	49.080.700,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			44.487.250,00
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.353.210.950,00	4.092.797.767,00	4.092.798.067,00	-260.412.883,00							4.126.198.350,00
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*				25 Orang/ b ulan	25 Orang/ b ulan	4.353.210.950,00	4.092.797.767,00	4.092.798.067,00	-260.412.883,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			4.126.198.350,00
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	153.754.600,00	320.819.900,00	323.883.600,00	170.129.000,00							1.174.463.900,00
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	2.399.300,00	2.747.300,00	5.811.000,00	3.411.700,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			16.674.400,00
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	64.145.700,00	111.142.000,00	111.142.000,00	46.996.300,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			295.485.350,00

	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan*				2 Paket	2 Paket	7.993.500,00	7.993.500,00	7.993.500,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			24.754.500,00
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	13.365.000,00	11.642.000,00	11.642.000,00	-1.723.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			127.551.500,00
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan*				3 Paket	3 Paket	21.538.100,00	19.638.100,00	19.638.100,00	-1.900.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			62.392.150,00
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*				50 Laporan	50 Laporan	44.313.000,00	167.657.000,00	167.657.000,00	123.344.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			647.606.000,00
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	664.342.936,00	688.318.700,00	688.318.700,00	23.975.764,00							1.129.659.684,00
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*				850 Laporan	850 Laporan	2.200.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	6.600.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.375.000,00
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	48.885.000,00	29.802.000,00	29.802.000,00	-19.083.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			113.509.500,00
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*				3 Laporan	3 Laporan	19.250.000,00	17.910.000,00	17.910.000,00	-1.340.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			59.623.200,00
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan*				1 Laporan	1 Laporan	594.007.936,00	631.806.700,00	631.806.700,00	37.798.764,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			944.151.984,00
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik				100 %	100 %	43.300.000,00	171.656.000,00	171.656.000,00	128.356.000,00							231.404.000,00

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*				10 Unit	10 Unit	17.500.000,00	145.856.000,00	145.856.000,00	128.356.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			140.454.000,00
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*				4 Unit	4 Unit	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			90.950.000,00
2,	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial ; Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial ; Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan**				**100, 100, 100 %**	**100, 100, 100 %**	**121.715.100,00**	**94.405.000,00**	**94.405.000,00**	**-27.310.100,00**					**Penyelenggara PUG/UGB PSM, TKSK, PSKS Keluarga, PSKS Lembaga dan LK3**		**391.000.000,00**
		[Meningkatnya pemberdayaan sosial]	***Persentase lembaga di bidang sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial Persentase penyelenggara PUB/UGB yang tertib perizinan pengumpulan sumbangan***	***100***	***0 42.50***	***100***			***121.715.100,00***	***94.405.000,00***	***94.405.000,00***	***-27.310.100,00***						***100***	***391.000.000,00***

			Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial															
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang				100 %	100 %	10.037.000,00	0,00	0,00	-10.037.000,00							25.000.000,00
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang*				50 Dokumen	50 Dokumen	10.037.000,00	0,00	0,00	-10.037.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	03. Penanganan kemiskinan			25.000.000,00
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	111.678.100,00	94.405.000,00	94.405.000,00	-17.273.100,00							366.000.000,00
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				2 Keluarga	2 Keluarga	17.694.500,00	15.570.000,00	15.570.000,00	-2.124.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	03. Penanganan kemiskinan			20.000.000,00
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota*				7 Lembaga	7 Lembaga	70.393.600,00	62.954.000,00	62.954.000,00	-7.439.600,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	-			255.000.000,00

															antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	*Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota*				4 Orang	4 Orang	9.905.000,00	4.315.000,00	4.315.000,00	-5.590.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			31.000.000,00
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya*				20 Orang	20 Orang	13.685.000,00	11.566.000,00	11.566.000,00	-2.119.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			60.000.000,00
3,	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani**				**100 %**	**100 %**	**3.823.000,00**	**3.823.000,00**	**3.823.000,00**	**0,00**					**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**		**40.000.000,00**
		[Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan]	***Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani***	***100***	***100***	***100***			***3.823.000,00***	***3.823.000,00***	***3.823.000,00***	***0,00***						***100***	***40.000.000,00***
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kot	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang				100 %	100 %	3.823.000,00	3.823.000,00	3.823.000,00	0,00							40.000.000,00

		a untuk Dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal	dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/K ota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal															
	1.06.03.2.01.00 03	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kot a untuk dipulangkan ke Desa/Keluraha n Asal	*Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurah an Asal Kewenangan Kabupaten/K ota*				4 Orang	4 Orang	3.823.000,0 0	3.823.000,0 0	3.823.000,0 0	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasa n kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			40.000.000, 00
4,	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ; Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ; Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ; Persentase Gelandanga n Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ; Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraa n Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang**				**100, 100,10 0,100,1 00 % 100,10 0,10 0,100,1 00 %**	**100, 100,10 0,100,1 00 % 100,10 0,10 0,100,1 00 %**	**145.673.50 0,00**	**166.078.00 0,00**	**166.078.00 0,00**	**20.404.500,00**					**Pemerlu Pelayanan Kesejahter aan Sosial (PPKS)**		**344.980.00 0,00**

			terpenuhi kebutuhan dasarnya																
		[Meningkatnya Rehabilitasi Sosial]	***Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya***	***100***	***60.7195***	***100***			***145.673.500,00***	***166.078.000,00***	***166.078.000,00***	***20.404.500,00***						***100***	***344.980.000,00***
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis				100 %	100 %	141.133.500,00	161.544.000,00	161.544.000,00	20.410.500,00							329.480.000,00
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 Orang	100 Orang	26.477.000,00	22.528.000,00	22.528.000,00	-3.949.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama	-			80.000.000,00

														untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Orang	20 Orang	11.406.000,00	8.786.000,00	8.786.000,00	-2.620.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			4.000.000,00
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota*				25 Orang	25 Orang	24.340.000,00	42.300.000,00	42.300.000,00	17.960.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			62.500.000,00
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Orang	20 Orang	23.563.000,00	29.174.000,00	29.174.000,00	5.611.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			80.000.000,00
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	*Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Orang	5 Orang	9.777.000,00	13.286.000,00	13.286.000,00	3.509.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta	-			12.500.000,00

														N TAHUN SEBELUM NYA	peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	*Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*				17 Orang	17 Orang	26.454.500,00	32.023.000,00	32.023.000,00	5.568.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUM NYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			50.000.000,00
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Orang	5 Orang	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			3.000.000,00
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Orang	20 Orang	1.580.000,00	2.739.000,00	2.739.000,00	1.159.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			7.500.000,00
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan*				5 Orang	5 Orang	900.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	300.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang	-			5.000.000,00

			Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota									an, Semua Kel/Desa		harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				5 Orang	5 Orang	2.349.000,00	420.000,00	420.000,00	-1.929.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			17.500.000,00
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	*Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota*				15 Orang	15 Orang	13.827.000,00	8.628.000,00	8.628.000,00	-5.199.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			7.000.000,00
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan*				3 Orang	3 Orang	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			480.000,00

			Kabupaten/Kota															
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				100 %	100 %	4.540.000,00	4.534.000,00	4.534.000,00	-6.000,00							15.500.000,00
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	4.540.000,00	4.534.000,00	4.534.000,00	-6.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			15.500.000,00
5,	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ; Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi ; Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin ; Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan**				**100, 100, 70, 1,5 %**	**100, 100, 70, 1,5 %**	**150.000.000,00**	**142.888.000,00**	**138.882.000,00**	**-11.118.000,00**					**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**		**500.000.000,00**

		[Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial]	***Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin Persentase keluarga miskin dan rmetan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar***	***100 3 70***	***0 88.63***	***1 100 70***			***150.000.000,00***	***142.888.000,00***	***138.882.000,00***	***-11.118.000,00***						***100 1.5 70***	***500.000.000,00***
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota				100 %	100 %	150.000.000,00	142.888.000,00	138.882.000,00	-11.118.000,00							500.000.000,00
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata*				39500 Orang	39500 Orang	48.607.000,00	0,00	0,00	-48.607.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			200.000.000,00
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	*Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*				150 Orang	150 Orang	2.800.000,00	12.800.000,00	8.800.000,00	6.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi	-			100.000.000,00

															antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota*				10000 Orang	10000 Orang	29.170.000,00	55.196.000,00	44.396.000,00	15.226.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			100.000.000,00
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan*				4 Usulan	4 Usulan	69.423.000,00	74.892.000,00	85.686.000,00	16.263.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			100.000.000,00
6,	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana; Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya; Persentase Korban Bencana**				**100, 100, 100 %**	**100, 100, 100 %**	**119.242.500,00**	**150.001.000,00**	**150.001.000,00**	**30.758.500,00**					**Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**		**500.000.000,00**

			yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial																
		[Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana]	***Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya***	***100***	***0 100***	***100***			***119.242.500,00***	***150.001.000,00***	***150.001.000,00***	***30.758.500,00***						***100***	***500.000.000,00***
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota				100 %	100 %	87.450.500,00	96.473.000,00	96.473.000,00	9.022.500,00							400.000.000,00
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 Orang	100 Orang	21.996.000,00	29.441.000,00	29.441.000,00	7.445.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			75.000.000,00
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	*Jumlah Orang yang*				60 Orang	60 Orang	19.411.000,00	18.589.500,00	18.589.500,00	-821.500,00	Kab. Seruyan,	PENDAPATAN ASLI	Memperkuat penyelarasa	-			65.000.000,00

			Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota									Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	n kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.				
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	*Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota*				20 Orang	20 Orang	21.048.000,00	30.565.000,00	30.565.000,00	9.517.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			110.000.000,00
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	*Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 Orang	100 Orang	17.106.500,00	13.726.500,00	13.726.500,00	-3.380.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-			100.000.000,00
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	*Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota*				10 Orang	10 Orang	7.889.000,00	4.151.000,00	4.151.000,00	-3.738.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil	-			50.000.000,00

															dan makmur.				
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota				100 %	100 %	31.792.000,00	53.528.000,00	53.528.000,00	21.736.000,00							100.000.000,00
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	*Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				2 Kampung	2 Kampung	12.876.000,00	20.512.000,00	20.512.000,00	7.636.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				50.000.000,00
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	*Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota*				69 Orang	69 Orang	18.916.000,00	33.016.000,00	33.016.000,00	14.100.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-				50.000.000,00
7,	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik**				**100 %**	**100 %**	**28.285.000,00**	**28.893.500,00**	**28.893.500,00**	**608.500,00**							**109.000.000,00**
		[Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan]	***Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik***	***100***	***77.78***	***100***			***28.285.000,00***	***28.893.500,00***	***28.893.500,00***	***608.500,00***						***100***	***109.000.000,00***
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota				100 %	100 %	28.285.000,00	28.893.500,00	28.893.500,00	608.500,00							109.000.000,00

	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*				3 Dokumen	3 Dokumen	14.521.000,00	0,00	0,00	-14.521.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			76.000.000,00
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota*				3 Makam	3 Makam	7.494.000,00	28.893.500,00	28.893.500,00	21.399.500,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	-			21.000.000,00
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*				3 Laporan	3 Laporan	6.270.000,00	0,00	0,00	-6.270.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			12.000.000,00
	JUMLAH								**5.783.347.586,00**	**5.985.474.567,00**	**5.985.474.567,00**	**202.126.981,00**							**8.591.193.184,00**

3.4 PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

3.4.1 Program dan Kegiatan Pendukung Pengentasan Kemiskinan

Dalam upaya percepatan / akselerasi pengentasan kemiskinan terdapat 4 (empat) Program 7 (tujuh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan yang mendukung upaya tersebut, yaitu :

Tabel 3.7
Tagging Upaya Pengentasan Kemiskinan

#REF!

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		KET
			Target	Pagu	
1	2	4	7	8	17
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				**553.189.000,00**	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial**	**%**	**100**	**94.405.000,00**	
	2. Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	**%**	**100**		
	3. Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan	**%**	**100**		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang**	**%**	**100**	**0**	
1.06.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	50	0	
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota**	**%**	**100**	**94.405.000,00**	
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	2	15.570.000,00	
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	7	62.954.000,00	
1.06.02.2.03.0005 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapat peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	4	4.315.000,00	
1.06.02.2.03.0006 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK yang meningkat kapasitasnya	Orang	20	11.566.000,00	
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani**	**%**	**100**	**3.823.000,00**	
1.06.03.2.01. - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal**	**%**	**100**	**3.823.000,00**	
1.06.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	3.823.000,00	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**100**	**166.078.000,00**	
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
	5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
1.06.04.2. - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**%**	**100**	**161.544.000,00**	

1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	22.528.000,00	
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	8.786.000,00	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	42.300.000,00	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	29.174.000,00	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	13.286.000,00	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	32.023.000,00	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	260.000,00	
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.739.000,00	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.200.000,00	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	420.000,00	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	8.628.000,00	
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	200.000,00	
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	**Persentase Layanan yang dipenuhi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**%**	**100**	4.534.000,00	
1.06.04.2.02.0010 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	3	4.534.000,00	
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**100**	**138.882.000,00**	
	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	**%**	**100**		
	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	**%**	**70**		
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	**%**	**1,5**		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	**Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**%**	**100**	**138.882.000,00**	
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota yang Didata	Orang	39.500	0	
1.06.05.2.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10000	44.396.000,00	
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	8.800.000,00	
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	4	85.686.000,00	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**%**	**100**	**150.001.000,00**	
	2. Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	**%**	**100**		
	3. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	**%**	**100**		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	**Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota**	**%**	**100**	**96.473.000,00**	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	29.441.000,00	
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	18.589.500,00	
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	10	4.151.000,00	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	30.565.000,00	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	13.726.500,00	
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	**Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota**	**%**	**100**	**53.528.000,00**	
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten /Kota	Kampung	2	20.512.000,00	

1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	69	**33.016.000,00**	
				553.189.000,00	

Program Pengentasan Kemiskinan dilaksanakan oleh 4 bidang teknis yaitu Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang penangan bencana dengan total anggaran Rp. 553.189.000,-

Rencana Langkah strategis yang akan dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

1. Menurunkan beban pengeluaran, melalui fasilitasi penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, Bansos Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bansos ATENSI, Bansos Permakanan untuk lansia, Bansos Sandang untuk LKSA, Bansos Alat Bantu untuk penyandang disabilitas, Bansos untuk korban bencana dan Bansos untuk keluarga pioneer dan keluarga disabilitas (Bansos bersumber dana APBD dan APBN)
2. Meningkatkan pendapatan, melalui Pelatihan kewirausahaan, motivasi dan edukasi bagi keluarga pioneer, Bansos Barang stimulan usaha, pelatihan bina remaja, pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan pelatihan keterampilan bagi Anak terlantar / anak putus sekolah.

3.4.2 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam upaya penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 2 (dua) Program, 2 (dua) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan yang mendukung upaya tersebut, yaitu :

Tabel 3.8
Tagging Standar Pelayanan Minimal (SPM)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN INDIKATOR	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026		KET
			Target	Pagu	
1	2	4	7	8	17
UNSUR WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN				**258.017.000,00**	
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				**258.017.000,00**	
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya**	**%**	**100**	**161.544.000,00**	
	2. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		

	3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
	4. Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	**%**	**100**		
1.06.04.2. - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	**Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**%**	**100**	**161.544.000,00**	
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	22.528.000,00	penguatan program prioritas SPM
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	8.786.000,00	
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	42.300.000,00	
1.06.04.2.01.0004 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	29.174.000,00	
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	13.286.000,00	
1.06.04.2.01.0006 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	32.023.000,00	
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	260.000,00	
1.06.04.2.01.0009 -Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	2.739.000,00	
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	1.200.000,00	
1.06.04.2.01.0011 - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	420.000,00	
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	8.628.000,00	
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	200.000,00	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana**	**%**	**100**	**96.473.000,00**	
	2. Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	**%**	**100**		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	**Persentase Layanan dasar yang dipenuhi bagi Korban Bencana Alam dan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota**	**%**	**100**	**96.473.000,00**	
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	29.441.000,00	penguatan program prioritas Huma Betang
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	18.589.500,00	
1.06.06.2.01.0003 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	10	4.151.000,00	
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	30.565.000,00	
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	13.726.500,00	
				258.017.000,00	

3.5 INTEGRASI PROGRAM DINAS SOSIAL PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS JANJI POLITIK BUPATI, JANJI POLITIK GUBERNUR DAN JANJI POLITIK PRESIDEN TAHUN 2026

Dalam upaya dukungan terhadap Program Prioritas Janji Politik Bupati, Janji Politik Gubernur dan Janji Politik Presiden Tahun 2026 telah diintegrasikan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial yaitu :

Tabel 3.9
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Bupati dengan Program Nomenklatur

No	Program Prioritas Janji Politik Bupati	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2026		Perangkat Daerah
								Volume	Pagu	
1	1500 Beasiswa Pendidikan Tinggi D3/D4/S1/S2/S3, 1000 STDB, dan Wajib Belajar 12 tahun									SETDA (BAG KESRA), DISDIK, BKAD
2	Transformasi tata kelola (digitalisasi) keuangan daerah									BKAD, BAPENDA, DISKOMINFO
3	Pemberdayaan UMKM pada berbagai sektor									DISKOPERINDAG, DPMDES, DISPORAPARBUD, DKPP, DISKAN
	1000 STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya)									DKPP, DISKAN
4	Bantuan bibit unggul, pupuk, alat dan mesin									DKPP, DISKAN, DLH
5	Peningkatkan sarana dan prasarana bidang keagamaan secara menyeluruh (semua agama).									DINAS PUPR, SETDA (BAG KESRA)
6	Peningkatan kesejahteraan PNS, Pegawai Honorer, Unsur Pemerintahan dan Guru Keagamaan									BKPSDM, BKAD, DISDIK, SETDA (KESRA), DINSOS, DISKOMINFO
7	Peningkatan sarana prasarana sekolah umum, madrasah, pondok pesantren, sekolah minggu, dan sekolah keagamaan lainnya									DISDIK, SETDA (BAG KESRA), DISKOMINFO, DINAS PUPR
8	Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas / transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa	Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	100	22.528.000,00	SELURUH PERANGKAT DAERAH
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20	8.786.000,00	
					Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	25	42.300.000,00	
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20	29.174.000,00	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Pelatihan bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)	Kab. Seruyan	5	13.286.000,00	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Seruyan	17	32.023.000,00	

					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5	260.000,00	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20	2.739.000,00	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Pelayanan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5	1.200.000,00	
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5	420.000,00	
					Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	15	8.628.000,00	
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Seruyan	3	200.000,00	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya	Kab. Seruyan	10000	44.396.000,00	
		Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Penyediaan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Seruyan	100	29.441.000,00	
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Seruyan	60	18.589.500,00	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Pengungsian untuk Korban Bencana	Kab. Seruyan	10	4.151.000,00	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan	Kab. Seruyan	20	30.565.000,00	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan sosial	Kab. Seruyan	100	13.726.500,00	
9	Pembangunan dan peningkatan kapasitas perekonomian pada berbagai sektor utama, termasuk pendirian BUMD, Pendirian Perseroan Terbatas bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, serta pengembangan BUMDES									DKPP, DISKAN, DISKOPERINDAG, DPMDES, DPMPTSP, SETDA (BAG EKONOMI), SETDA (BAG HUKUM)
10	Keberlanjutan Islamic Center dan Pelabuhan Sigintung									DINAS PUPR, DISHUB
11	Peningkatan Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Internet, dan Air Bersih untuk Semua									DISKOMINFO, SETDA (BAG EKONOMI), DINAS PUPR, DISPERKIMTAN

Tabel 3.10
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Gubernur dengan Program Nomenklatur

No	Program Prioritas Gubernur	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2026		Perangkat Daerah
								Volume	Pagu	
1	**Kalteng Bermartabat**									PUPR, KESBANGPOL
	- Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan termasuk menembus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir									
	- Memperluas sosialisasi diberbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjunjung spirit hidup beradat dalam berkompetensi diberbagai bidang guna membangun masyarakat kalteng yang berdaya saing									
2	**Betang Maju**									PUPR, DPMDES, DISKOMINFO, SETDA (BAG EKONOMI)
	- Pembangunan 1000 km jalan desa									
	- Revitalisasi infrastruktur lintas kota/kabupaten									
	- Pembangunan delta kalteng ekonomi eksklusif									
	- Peningkatan infrastruktur air bersih desa									
	- Peningkatan akses listrik desa, 100% bersinar									
	- Akses sinyal dan internet di daerah pedalaman									
3	**Betang Makmur**									DKPP, DISKOPERINDAG, DISKAN, DISNAKER, DINSOS
	- 2 juta rupiah per KK bantuan pangan	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kab. Seruyan	4 Usulan	85.686.000,00	
	- Operasi pasar murah									
	- 250 miliarder muda baru									
	- Milenial job center									
	- Inkubasi UMKM									
	- Asuransi petani dan nelayan									
	- Bantuan perahu dan alat tangkap									
4	**Betang Cerdas**									DISDIK, SETDA (BAG KESRA)
	- Sekolah/kuliah gratis	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pembuatan Surat Keterangan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Kab. Seruyan	100 suket	0	
	- 1 keluarga harus ada sarjana									
	- 1000 rumah guru									
	- Insentif guru agama									
	- Kalteng mengaji									
5	**Betang Sehat**									DINKES, BKPSDM, DP3AP2KB, DPMDES
	- Berobat gratis berbasis KTP									
	- Insentif tenaga kesehatan desa									
	- Revitalisasi puskesmas desa									
	- Pendampingan ibu hamil dan pasca hamil									
	- 1 desa 1 ambulans									
6	**Betang Harmoni**									DISPORAPARBUD, DPMDES, DAMKAR, PUPR, DISPERKIMTAN, DINSOS
	- Berdayakan 100 Dewi (Desa Wisata)									
	- 150 Milyar Rupiah bantuan provinsi untuk kabupaten kota									
	- 250 juta rupiah stimulus desa									
	- Insentif kepala desa, BPD, damang, mantir, RT/RW se kalteng									
	- Layanan cepat tanggap kebakaran lahan dan bantuan warga	Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Penyediaan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Seruyan	100 orang	29.441.000,00	

					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Seruyan	60 Orang	18.589.500,00	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Pengungsian untuk Korban Bencana	Kab. Seruyan	10 Orang	4.151.000,00	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan	Kab. Seruyan	20 Orang	30.565.000,00	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan sosial	Kab. Seruyan	100 Orang	13.726.500,00	

Tabel 3.11
Integrasi Program Prioritas Janji Politik Presiden dengan Program Nomenklatur

No	Program Prioritas Presiden	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Lokasi	2026		Perangkat Daerah
								Volume	Pagu	
1	Pengentasan Kemiskinan	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penertiban PUG dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial, dan pembuatan Surat Rekomendasi PUB	Kab. Seruyan	50 Dokumen	0	DINAS SOSIAL, SETDA (BAG KESRA), DKPP, DISKOPERINDAG, DISPERKIMTAN, DISKAN, DISDUKCAPIL, DINKES, DISDIK, DPMDES, DISNAKER, DISKOMINFO, SETDA (BAG EKONOMI)
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelatihan/pertemuan peningkatan kapasitas PSKS Keluarga,Assesment KPM yang diintervensi dan Bantuan Stimulan Pengembangan Usaha Keluarga	Kab. Seruyan	2 Keluarga	15.570.000,00	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kegiatan pengembangan komepetensi Relawan Sosial, sosialisasi nilai nilai kepahlawaan pada pelajar sma/smk, Kelembagaan pelestarian nilai nilai Keperintisan Sosial, Akreditasi LKS, monev karang taruna, penindakan LKS dan Verval LKS, MOnitoring dan Evaluasi LKS/ Verifikasi Tanda Daftar LKS dan Pelembagaan Sekolah Rakyat	Kab. Seruyan	7 Lembaga	62.954.000,00	
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Sertifikasi kelembagaan LK3 dan uji kompetensi anggota LK3 dan fasilitasi dalam penanganan kasus keluarga bermasalah sosial	Kab. Seruyan	4 Orang	4.315.000,00	
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Peningkatan kapasitas penyuluh sosial, penyuluh sosial masyarakat, pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat dan/atau TKSK	Kab. Seruyan	20 Orang	11.566.000,00	
		Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Reunifikasi warga korban tindak kekerasan ke tempat asalnya dan pendampingan kasus korban tindak kekerasan	Kab. Seruyan	4 orang	3.823.000,00	
		Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	100 Orang	22.528.000,00	
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20 Orang	8.786.000,00	
					Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	25 Orang	42.300.000,00	
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan reunifikasi Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20 Orang	29.174.000,00	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dan Pemberian Pelatihan bagi Anak Terlantar / Anak Putus Sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)	Kab. Seruyan	5 Orang	13.286.000,00	
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Seruyan	17 Orang	32.023.000,00	

					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5 Orang	260.000,00	
					Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	20 Orang	2.739.000,00	
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Pemberian Pelayanan Kedaruratan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5 Orang	1.200.000,00	
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	5 Orang	420.000,00	
					Pemberian Layanan Rujukan	Pemberian Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis	Kab. Seruyan	15 Orang	8.628.000,00	
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis	Kab. Seruyan	3 Orang	200.000,00	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
					Penyediaan Sandang	Penyediaan pakaian dan kelengkapan lainnya bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
					Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS)Lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	Kab. Seruyan	-	-	
					Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Kab. Seruyan	-	-	
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga bagi PPKS lainnya	Kab. Seruyan	-	-	
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota	Kerja Sama dengan Balai / Panti Rehabilitasi Sosial / Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa	Kab. Seruyan	3 dokumen	4.534.000,00	
		Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi data calon KPM dan Pembinaan Operator pengelola data	Kab. Seruyan	39.500 Orang	0	
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako, PBI dan Bansos lainnya	Kab. Seruyan	10000 Orang	44.396.000,00	
					Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Verivali kelayakan dan Fasilitasi penyaluran Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Seruyan	150 Orang	8.800.000,00	
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Kab. Seruyan	4 Usulan	85.686.000,00	
		Penanganan Bencana	Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Penyediaan Makanan	Penyediaan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Kab. Seruyan	100 orang	29.441.000,00	
					Penyediaan Sandang	Penyediaan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Kab. Seruyan	60 Orang	18.589.500,00	
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Pengungsian untuk Korban Bencana	Kab. Seruyan	10 Orang	4.151.000,00	
					Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Bantuan untuk Kelompok Rentan	Kab. Seruyan	20 Orang	30.565.000,00	
					Pelayanan Dukungan Psikososial	Pemberian Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan sosial	Kab. Seruyan	100 Orang	13.726.500,00	
2	Penurunan Prevalensi Stunting	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	Kab. Seruyan	3.612 KPM	.....	DINKES, DP3AP2KB, DPMDES, DINSOS, DISDIK, DKPP, PUPR, DLH,

										DISKOMINFO, DISKAN, DISPERKINTAN
3	Program makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil									DISDIK, DINKES, SETDA (BAG KESRA), DKPP, DINSOS, DPMDES, DISKOMINFO
4	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 Tahun dan Bangun RS Lengkap berkualitas di Kabupaten									DINKES, RSUD, PUPR, DISKOMINFO
5	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional									DKPP, DPMDES
6	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi									DISDIK, PUPR, DINSOS, DISKOMINFO
	- Sekolah Garuda									
	- Sekolah Rakyat	Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pemberdayaan PSKS Kelembagaan Sekolah Rakyat	Kab. Seruyan	7 Lembaga	62.954.000,00	
7	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Penyaluran Bantuan dan Pendistribusian Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS)	Kab. Seruyan	10000 Orang	44.396.000,00	DINSOS, DISKOPERINDAG, DKPP, DINKES
8	Menaikkan gaji ASN (terutama Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan), TNI/POLRI dan Pejabat Negara									BKPSDM, DISDIK, DINKES
9	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan									PUPR, DISPERKIMTAN, DPMDES

4.5 REKAPITULASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Tabel 3.12
Usulan Aspirasi Masyarakat Tahun 2026

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN /KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN /DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD
1	1981228	21-01-2025	KADES BAHAUR	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pengadaan Marbot Langgar Nurul Hikmah	RT. 004, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Hanau	Bahaur	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilaksanakan pekerjaanya sesuai dengan RENJA dan anggaran yang ada	Ditolak, pengelolaan rumah ibadah bukan tugas dan fungsi dinas sosial
2	1984745	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan kursi roda	rt se kelurahan kuala pembuang I, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
3	1984775	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan tongkat terapi	jl. tjilik riwut rt.30 rw.02, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
4	1984810	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan kaki palsu	jl. samudin rt.33 rw.01, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Ditolak, Dinas Sosial tidak menganggarkan bantuan kaki palsu
5	1985216	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan tandu lipat	jl. ais nasution rt.01 rw.01, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan

																		calon penerima manfaat
6	1985237	21-01-2025	LURAH KUALA PEMBUANG I	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	bantuan alat pendengaran	rt sekelurahan kuala pembuang I, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Kuala Pembuang I	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
7	2021391	23-01-2025	KADES MUARA DUA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pengadaan bantuan penyandang disabilitas/Penyakit menahun	Desa Muara Dua, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Muara Dua	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan disampaikan kepada PD terkait dengan memperhatikan usulan terhadap program prioritas dan ketersediaan anggaran pada tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan angggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
8	2023928	23-01-2025	KADES SUNGAI UNDANG	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan PKH	Semua RT, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Sungai Undang	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
9	2024153	23-01-2025	KADES SUNGAI UNDANG	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan KIP bagi anak sekolah kurang mampu	RT 01 dan 04, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Sungai Undang	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Ditolak, wewenang Dinas Sosial mengeluarkan Surat Keterangan terdata dalam DTKD
10	2024748	23-01-2025	KADES PEMATANG LIMAU	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma (memerlukan kursi roda,tongkat dan kaca mata	Desa Pematang Limau, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Pematang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
11	2056059	24-01-2025	KADES PARING RAYA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	2 Orang Petugas Marbot Mesjid	Desa Paring Raya, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Hanau	Paring Raya	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah Teknis untuk dilaksanakan pekerjaanya sesuai dengan RENJA dan anggaran yang ada	Ditolak, pengelolaan rumah ibadah bukan tugas dan fungsi dinas sosial
12	2059798	24-01-2025	KADES PERSIL RAYA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan kepada masyarakat miskin	Desa, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Persil Raya	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, Agar disampaikan proposal lengkap BNBA, untuk dilaksanakan assesment kelayakan calon penerima manfaat
13	2060294	24-01-2025	KADES PERSIL RAYA	Kelurahan / Desa	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi masih kurang	Bantuan sosial penanggulangan bencana	Desa, Kab. Seruyan	Kab. Seruyan	Seruyan Hilir	Persil Raya	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diteruskan kepada PD terkait dengan memperhatikan Program prioritas dan ketersediaan Anggaran Tahun 2026	-	diteruskan ke Perangkat Daerah teknis untuk dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia	Diproses, akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan korban bencana

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Sosial disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Subtansi Perubahan RENJA ini merupakan hasil sinkronisasi antara pelaku kepentingan dan stakeholder dengan memperhatikan permasalahan yang faktual dihadapi di wilayah Kabupaten Seruyan. Di sisi yang lain, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026, Perubahan RKA Dinas Sosial, serta dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Kedisiplinan dan komitmen bersama sangat menentukan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan tahunan ini, terutama untuk bidang –bidang pada Dinas Sosial agar :

1. Terus melengkapi data dan informasi untuk program dan kegiatan pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan guna mempermudah pelaksanaan program dan kegiatan bersangkutan.
2. Mendokumentasikan dan mengkaji hasil pelaksanaannya ditingkat Dinas Sosial Kabupaten Seruyan untuk kemudian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara lengkap sebagai salah satu wujud akuntabilitas kinerja dan mempermudah penyusunan program dan kegiatan selanjutnya.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan seluruh pihak terkait guna konsistensi antara perencanaan dan pengangaran.

Selama realisasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan.

Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Seruyan ini sangat tergantung pada tekad dan komitmen, semangat, ketaatan dan kedisiplinan para pelaku kepentingan dan stakeholder yang terlibat dalam pembangunan bidang Sosial di Kabupaten Seruyan sehingga sasaran yang menjadi target pembangunan tahun ini dapat memberikan hasil optimal yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 2 September 2026
Kepala Dinas Sosial,

HALIDAH, S.Pi
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19731004 200604 2 017